



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

STAGNASI EKONOMI GLOBAL: PROYEKSI, DAMPAK DAN RESPONS INDONESIA

Fauzan Lazuardi Ramadhan
Analisis Legislatif Ahli Pertama
fauzan.ramadhan@dpr.go.id

Venti Eka Satya
Analisis Legislatif Ahli Madya
venti.satya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kinerja perekonomian global masih akan mengalami stagnasi. Pelemahan ini terjadi setidaknya hingga tahun 2026, hal ini disampaikan dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 pada 11 Februari 2025. Menurutnya, kondisi ini akan terus berlanjut hingga tercapai kesetimbangan baru dalam hubungan geopolitik yang stabil dan dapat diterima secara politik.

Kebijakan-kebijakan berbagai negara, khususnya Amerika Serikat (AS) diyakini akan mempengaruhi tatanan perekonomian global. Presiden AS, Donald Trump, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan menaikkan tarif impor bagi komoditas aluminium dan baja yang masuk ke AS menjadi 25 persen dari sebelumnya hanya 10 persen serta rencana penurunan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed).

Penerapan kebijakan tersebut tentunya akan berdampak bagi perekonomian, baik dalam skala global maupun nasional. Dalam skala global, kebijakan ini memicu perang dagang antar negara-negara besar yang akan menyebabkan pergeseran rantai pasok global serta fluktuasi komoditas industri. International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa perang dagang 2.0 ini akan memangkas pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,8 persen pada tahun 2025 dan 1,3 persen pada tahun 2026.

Sementara itu, dalam skala nasional, kebijakan tersebut berdampak pada beberapa hal, seperti, *pertama*, melemahnya nilai tukar mata uang rupiah yang akan mengganggu stabilitas ekonomi, terutama bagi sektor yang bergantung pada impor dan utang dalam mata uang asing. *Kedua*, memperlambat kinerja ekspor Indonesia, khususnya untuk komoditas aluminium dan baja. Hal ini dikarenakan AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia setelah Republik Rakyat China (RRC) dengan pangsa ekspor sebesar 11,22 persen dari total pangsa ekspor Indonesia pada Bulan Desember 2024. *Ketiga*, terganggunya neraca perdagangan yang akan berimplikasi pada kenaikan inflasi. *Keempat*, stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional, Kepala Ekonom Bank Permata Tbk. menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan di AS akan berdampak pada penurunan perekonomian nasional sebesar 0,06 persen.

Merespon kebijakan dari Presiden AS, Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan perang dagang yang sedang terjadi untuk dapat menjadi peluang positif bagi perekonomian nasional. Bank Indonesia (BI), menyampaikan bahwa Indonesia seharusnya dapat mengambil alih pangsa ekspor yang sebelumnya dikuasai oleh RRC. Selain itu, peluang lain yang muncul datang dari potensi realokasi investasi, salah satu bentuknya adalah perpindahan kegiatan produksi perusahaan dari lokasi yang memiliki tarif tinggi ke lokasi yang menetapkan tarif lebih rendah.

Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil yakni dengan reformasi struktural melalui percepatan digitalisasi di pemerintahan guna menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan iklim investasi. Sementara itu, dalam merespon

potensi inflasi global akibat kebijakan tersebut, BI telah menyiapkan beberapa langkah yakni (i) menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melakukan intervensi di pasar valas; (ii) memperkuat cadangan devisa yang saat ini berada pada posisi 156,1 miliar dolar AS; (iii) menyesuaikan kebijakan suku bunga dengan terus memantau perkembangan inflasi global dan kebijakan The Fed; serta (iv) meningkatkan kerja sama internasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) menyampaikan bahwa dampak dari kebijakan Presiden AS ke perekonomian Indonesia tak sedalam yang dialami negara lain. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat sebesar 5,03 persen hingga kuartal III-2024; cadangan devisa negara yang tinggi; serta terkendalinya inflasi di level 1,57 persen pada akhir tahun 2024. Namun demikian, kebijakan pemerintah yang bersifat intervensi dalam merespon kebijakan Presiden AS diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kinerja ekspor, serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Atensi DPR

Dinamika perekonomian global diprediksi akan mengalami stagnasi hingga tahun 2026. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam kebijakan negara-negara besar, khususnya AS yang berimplikasi pada perang dagang global. Pemerintah Indonesia melalui BI telah menerapkan beberapa strategi untuk memitigasi risiko yang dimungkinkan terjadi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang akan melemahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Merespon hal tersebut, DPR RI melalui Komisi XI perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan fiskal yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia agar mampu mengendalikan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, Komisi XI DPR RI perlu mendorong Pemerintah Indonesia agar memanfaatkan peluang yang ada untuk menarik investasi masuk ke Indonesia dan melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumber

bisnis.com, 10 Februari 2025;
cnnindonesia.com, 10 Februari 2025;
jppn.com, 13 Februari 2025;
kontan.co.id, 12 Februari 2025;
metrotvnews.com, 8 Februari 2025;
tempo.co, 7 Februari 2025.



EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
M. Insan Firdaus
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*